



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.M. Noto Sunardi No. 01, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur 76251

Telepon (0543) 24060, Faksimile (0543) 22729

Laman <https://www.paserkab.go.id> , Pos-el humasprotokol.paserkab@gmail.com

NOTULA

I. PELAKSANAAN

Dasar Pelaksanaan : Undangan Sekretaris Daerah
Nomor : B/900.1.1/165/BKAD/II/2026
Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Februari 2026
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat BKAD Kab. Paser
Acara : Rapat Pembahasan Pergeseran Pertama APBD Tahun Anggaran 2026.

II. PESERTA RAPAT

Rapat dihadiri oleh :

1. Sekretaris Daerah Kab. Paser
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Setkab. Paser
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab. Paser
4. Kepala BKAD Kab. Paser
5. Kepala Bappedalitbang Kab. Paser
6. Kepala Bapenda Kab. Paser
7. Sekretaris BKAD Kab. Paser
8. Sekretaris Bappedalitbang Kab. Paser
9. Kabag. Administrasi Pembangunan Setkab. Paser
10. Kabag. Barang dan Jasa Setkab. Paser
11. Kabid. Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Kab. Paser
12. Kabid. PPM Bappedalitbang Kab. Paser
13. Kabid. P2EP Bappedalitbang Kab. Paser
14. Kabid. Inpraswil Bappedalitbang Kab. Paser
15. Kabid. Anggaran BKAD Kab. Paser
16. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kab. Paser
17. Kabid. BMD BKAD Kab. Paser

III. LATAR BELAKANG

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

IV. PEMBAHASAN

Rapat TAPD dibuka oleh Plt. Assisten Administrasi Umum, dengan pembahasan sebagai berikut :

- Agenda rapat TAPD adalah pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026
- kedua ada arahan Bapak Bupati juga terkait dengan memang ada beberapa yang harus dilakukan penyesuaian untuk pada saat awal tahun.
- Kabid Anggaran telah berkoordinasi dengan BPKD Provinsi, terkait Bantuan Keuangan Propinsi, bahwa saat ini, untuk Bantuan Keuangan belum bisa dieksekusi untuk inputan belanja secara rincinya karena masih belum selesai verifikasi.
- Tetapi yang paling mendesak itu adalah terkait dengan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, dimana di dalam penetapan APBD 2026 itu ada beberapa perangkat daerah yang masih menginput secara global atau belum terinci, sehingga untuk PJLP belum bisa dilakukan penandatanganan kontrak, karena di DPA nya belum diinput secara rinci.
- Selanjutnya adalah Permintaan terkait dengan pengajuan dukungan hibah uang terkait Renovasi perumahan Dinas prajurit Kodam 6 Mulawaman tahun 2026.
- Berikutnya terkait dengan bangunan-bangunan yang sudah dikunjungi beliau terutama itu adalah perpustakaan umum daerah, dimana masih ada yang belum selesai, dan arahan beliau juga untuk diakomodir beberapa kegiatan yang belum selesai, karena rencananya kalau ada kelaksanaan rakornas di bulan Agustus ini, akan dilaksanakan di Kabupaten Paser.
- Kemudian yang mendesak juga terkait dengan untuk pendampingan penyusunan LPPD dan SPM.
- Kemudian terkait dengan hutang Tahun Anggaran 2025, yaitu dengan total Rp28.700.000.000 sekian dengan rincian belanja pengadaan tanah senilai Rp12.000.000.000 serta pembayaran untuk pengawasan kegiatan di enam perangkat daerah tadi.
- Apakah kesepakatan nantinya untuk keperluan pergeseran ini sementara akan diambilkan dari belanja gaji atau apakah TPP yang digeser dulu satu bulan dengan total Rp28.000.000.000 tentunya nanti kita kembalikan di perubahan nanti.
- Telah terbit PMK terkait dengan kurang bayar dan lebih bayar, yaitu PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025, PMK ini adalah terkait dengan kurang bayar tahun 2024, kurang bayar DBH, dana bagi hasil kurang bayar dan lebih bayar, untuk Kabupaten Paser kurang bayarnya yang belum dibayarkan yaitu kurang bayar tahun 2023.
- Terkait dengan perjalanan dinas, masih ada telaahan karena ada beberapa OPD yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, memang harus turun ke lapangan, karena terkena dampak efisiensi 60%, sehingga sisa perjadinya 40%, ada juga telaahan staf dari Inspektorat.
- Ada arahan dari Pak Bupati agar masing-masing asisten yang mengkoordinasi terkait dengan perjadin supaya ada efisiensi.

SEKRETARIS DAERAH

- Di pergeseran ini kita melakukan penyesuaian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang urgen dan berjalannya waktu di tahun 2025 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita bayarkan karena memang kondisi ketersediaan anggaran kita tidak mencukupi untuk kita lakukan pembayaran di tahun 2025. Ada beberapa kegiatan yang paling besar terkait dengan pengadaan tanah yang ada di Disperkimtan sekitar Rp12.000.000.000, dari Total sekitar Rp16.000.000.000 itu sebagian besar adalah Belanja pengawasan di beberapa kegiatan yang belum kita bayarkan, di sekitar 6 perangkat daerah, tentu sebelum kita akomodir di perubahan, proses direview oleh Inspektorat ini juga menjadi perhatian apakah ini sudah dilaksanakan atau sudah selesai. sehingga bisa kita tuangkan di pergeseran ini atau kita masukkan di pergeseran. perlu juga kita diskusikan atau kita dapatkan informasi apakah kegiatan-kegiatan yang tidak dibayarkan atau yang belum dibayarkan di 2025 kemudian kita bayarkan di pergeseran 2026 ini yang sudah dilakukan direview Inspektorat.
- Kemudian dengan anggaran yang relatif tetap sekitar Rp.4,1 triliun ada beberapa arahan dari Pak Bupati berdasarkan permohonan-permohonan dan bisa disampaikan khusus dari Pangdam dalam rangka membangun atau merenovasi rumah dinas Prajurit Kodam Mulawarman itu nilainya sekitar Rp15 miliar maksimal kata Pak Bupati.
- kemudian juga ada kegiatan dari untuk kelengkapan penyempurnaan fasilitas perpustakaan nilainya sekitar Rp8 miliar.
- Arahan terkait Datasen pada Dinas Sosial ada sekitar Rp1,2 miliaran ada arahan dari beliau tentu dengan kondisi anggaran tidak ada bertambah ini diupayakan dulu sebenarnya melalui kegiatan-kegiatan di perangkat daerah.
- Oleh karena itu beberapa kegiatan tadi yang nilainya mungkin Rp.20 miliaran harus kita carikan. Apakah bisa tertutupi kalau kita lakukan pergeseran dari belanja pegawai kita.
- Terkait dengan LPPD dan SPM seperti disampaikan Bu Asisten, ini juga menjadi perhatian Bapak Bupati karena tahapan LPPD dengan SPM ini kegiatan pelaporannya di tahun 2025, tapi tahapannya sampai Maret ini, masih ada proses pendampingan-pendampingan, terutama LPPD yang mengalami perubahan indikator, karena saat kita menyusun pelaporan kemarin pendampingan sempat tiga kali masih mengacu ke Permendagri 18 tahun 2020 sementara keluar lagi Permendagri 19 tahun 2024 yang SK nya baru ditandatangani di Januari untuk penetapan indikator-indikator yang mengalami perubahan indikator, dari 126 menjadi 121, dan capaian indikatornya itu rasanya 45 persen, hampir 50 persen mengalami perubahan, menjadi perhatian kita dan untuk kegiatan-kegiatan LPPD maupun SPM ini kalau bisa diakomodir.
- Kemudian terkait dengan dana transfer (kurang/lebih bayar) yang disampaikan Kepala BKAD tentu ini kita akan melakukan penyesuaian di anggaran perubahan nanti.
- kemudian itu kalau ada kegiatan-kegiatan kita koordinasi dengan PU kiranya ada yang bisa digeser, kegiatan jalan itu biar nanti dirubah dengan pola multiyears sehingga bisa menutupi di pergeseran ini kalau memang sesuai dengan ketentuan bisa pergeseran antar OPD.

- yang terakhir tentu administrasi pergeseran ini disampaikan kita ke DPRD, perlu kita tindak lanjuti juga itu dalam bentuk penyampaian/pemberitahuan saja bukan minta persetujuan.
- Bapak Bupati menyarankan perjalanan dinas dipangkas di Tahun Anggaran 2027 karena fokus untuk menuntaskan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- Terkait kegiatan-kegiatan BIMTEK agar terpusat di BKPSDM, karena terkait dengan manajemen talenta, dan manajemen talenta agar kita siapkan anggaran itu ada beberapa, karena Bapak Bupati ingin di 2026 ini dalam hal melakukan rotasi, mutasi, promosi itu sudah menggunakan manajemen talenta, ada beberapa kegiatan di BKPSDM, rasanya ada masuk beberapa permohonan anggaran itu kita fasilitasi juga, karena di kesempatan pertama ini jangan sampai karena terbatasnya anggaran, karena fasilitas di BKPSDM terbatas menyebabkan terkendala di dalam hal pengaplutan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- Terkait darimana kita mengambil anggaran untuk pergeseran, Bapak Bupati pernah menyampaikan, agar menarik sebagian anggaran kegiatan di PU di Bidang Jalan, karena seiring dengan target ini maka penuntasan jalan akan di Multiyears kan, dituntaskan jalan dengan jembatan di 2027, kurang lebih itu pernah ada beliau menyampaikan.
- Terkait dengan rencana hibah ke Kodam, mekanisme di hibah kita, kalau hibah duit sudah, yang bisa dilakukan ini dalam bentuk kegiatan yang biasa, seperti yang pembangunan SPN, perlu mungkin kita sampaikan ke Pak Bupati untuk apa tindak lanjuti penanganannya untuk Kodam ini.
- kemudian terkait dengan PJLP, karena proses untuk kontraknya di Barjas tidak bisa disegerakan, sementara waktu berjalan, teman-teman masih aktif bekerja, kita harapkan beberapa bulan ke depan, telah kita sampaikan dengan Pak Bupati untuk dua bulan, itu pola PTT itu sambil menunggu proses kontrak PJLP.

KEPALA BAPENDA

- Tadi Ibu Asisten sampaikan angka kurang salur minus 91 miliar dari 810 M yang kita pakai 900 M, Asumsinya SILPA 300 miliar di Tahun 2026 juga kita pakai, sudah menghitung tidak berapa kira-kira kurang salur 2025, jangan-jangan bukan 91 miliar kita minus. Jangan-jangan tambah 300 M, tapi kalau kita punya asumsi misalkan kurang salur 2025, karena 2023-2024 kan sudah ketemu kita angkanya yang belum tahu kan 2025, ada potensi naik lagi itu minusnya.
- fokus ke pergeseran, kira-kira belanja apa yang mau digeser untuk menutupi.

BAGIAN HUKUM

- Terkait dengan percepatan nomor Perbup. Pergeseran karena sekarang semua perda dan perkada tidak terkecuali harus harmonisasi maka kami minta dulu ini draft rancangannya terlebih dulu walaupun angkanya belum final dan naskah penjelasannya untuk kemudian akan kami proses harmonisasi karena setiap tahun ini wajib, kelengkapan dokumen dokumen lainnya nanti menyusul.

KEPALA BAPPEDALITBANG

- Terkait deadline waktu pergeseran harus ditentukan untuk mensinkronkan waktu antara Bappeda dan BKAD, nanti akan kami koordinasikan dengan BKAD.
- Melaporkan tentang Sinkronisasi Program/Proyek Strategi Nasional.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

- Sudah ada kesepakatan dengan Asisten Ekonomi dan Pembangunan bahwa setiap OPD dinasnya itu harus ada pendamping namun memang didapati beberapa OPD ini kadang terlalu berlebihan dan kayaknya kepada dinas tidak bisa mengendalikan, untuk mengendalikan hal tersebut harus ada surat edaran dari TAPD, minimal instruksi bahwa yang namanya perjalanan harus ada standar, misalnya melaksanakan koordinasi konsultasi, itu harus ada pertimbangan dulu dari kepala OPD nya.
- Kedua, berkaitan dengan apa yang ada di disnaker berkaitan pekerja rentan, kami sudah rapat juga kemarin dengan pihak beberapa pihak saya sudah sampaikan ke disnaker berapa sih yang mau anda lindungi sebenarnya kalau menggunakan yang di 2025 berarti menurun drastis dan uang itu bukan untuk dipakai disnaker tapi harus dikembalikan kepada TAPD lagi untuk kemana uang itu.
- Saya laporkan terkait kegiatan di Kesra tentang rencana kita untuk Sinergitas maupun kolaborasi antara Paser Tuntas dan Gratis Poll ternyata baru kita yang menginisiasi untuk kerjasama mereka memang tidak menginginkan bahwa kalau sudah ada kerjasama itu, karena yang kita pakai tidak hanya mahasiswa murni, nanti kita sepakati apakah masih tidak dengan kepala juga dengan PKB-nya nanti karena kita janji bahwa kita akan membiayai Living cost, hal ini dilaporkan jika diperhitungkan akan dipangkas.

KEPALA BIDANG ANGGARAN

- Fokus pergeseran kali ini mungkin lebih ke pembayaran hutang dan perbaikan kode rekening untuk pembayaran PJLP, jadi untuk percepatan mohon dibantu Bagian Hukum untuk percepatan nomornya, untuk pergeseran Bankeu karena untuk mempersingkat waktu nanti ada tersendiri, target pergeseran tidak sampai 1 bulan.
- Terkait dengan Hibah Uang sesuai pengalaman saya contoh seperti hibah uang ke KPU sebesar 35 M, yang dipanggil kita dengan Parpol, kita bakal repot ini sebagai teknisnya, berbeda jika dalam bentuk kegiatan atau hibah barang, Alangkah baiknya ada surat permohonan atau proposal baru nanti kita bahas.
- Untuk pembayaran hutang bisa kita ambil dulu dari TPP satu bulan nanti pada perubahan kita kembalikan.

KEPALA BKAD

- Terkait dengan pembahasan Hibah uang alangkah baiknya ada surat permohonan atau proposal maupun RAB, artinya nanti kita bahas kemudian setelah ada suratnya pak, dan akan kita masukkan nanti pada pergeseran kedua bersamaan dengan merincikan belanja Bankeu Provinsi jika sudah final nanti.
- Terus untuk pergeseran pertama ini kita fokuskan dulu untuk pembayaran hutang yang telah direview Inspektorat dan perbaikan rekening untuk PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).
- Perlu juga kita bahas apa apa saja yang bisa diterima PJLP ini.

BAGIAN BARJAS

- Melaporkan untuk proses PJLP setelah keluar surat Pak Bupati tanggal 20 Januari 2026, kita tindak lanjuti dengan surat Sekda terkait dengan dokumen persiapan pengadaan satu hari setelahnya di tanggal 21 Januari 2026. Hampir seluruh perangkat daerah memang sudah berproses melalui pejabat pengadaan, bahkan untuk yang di luar dari pendidikan, kesehatan, ini memang sebagian besar sudah berkontrak. sudah koordinasi juga dengan bendahara gaji bahwa posisinya eh paling lambat tanggal lima masih bisa dibayar satu bulan gajinya, namun ada juga beberapa seperti kemarin di Dinas Kesehatan dan Pendidikan, karena memang jumlahnya banyak memang masih berproses.
- Memang untuk PJLP yang pasti tidak dibayarkan adalah yang bulan Januari, karena kami berkontrak tidak mungkin berlaku surut, jadi memang yang tertuang di dalam HPS sebelas bulan waktu pelaksanaan pekerjaannya, karena Januari tidak terhitung, jadi paling lambat tanggal lima memang berkontrak supaya bisa dibayarkan sebelas bulan, yang satu bulannya itu untuk THR.
- Jadi yang tertuang di dalam HPS itu sebelas bulan untuk gaji dan satu bulan untuk THR, jadi dua belas bulan. Yang ada di dalam DPA itu tiga belas bulan, jadi yang satu Januari itu tidak masuk dipagu, tapi untuk HPS hanya dua belas bulan saja.
- PJLP ini memang gaji belum standar UMK dan seharusnya ada BPJS juga termasuk THR, bahkan mungkin ada yang memasukkan sampai ke pakaian dan sebagainya, tapi memang minimal terkait dengan gaji sesuai UMK dan BPJS.

KEPALA BIDANG PPM BAPPEDALITANG

- Pada pergeseran ini semoga kami diberi kesempatan untuk memperbaiki penanganan kalau memungkinkan tagging di SPD terkait program-program kemiskinan dan stunting. Tagging ini dianggap penting Pak Seskda karena terintegrasi nanti menjadi laporan pemerintah daerah terkait laporan

kemiskinan, kami masih menemukan cukup banyak tentunya belanja-belanja kita yang masuk kategori penanganan kemiskinan tapi belum ditagging.

- Kami sudah mengundang dan mensosialisasikan ke perangkat daerah, tinggal kapan SIPD dibuka baru kita tagging.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- Berkaitan dengan masalah utang mungkin di pergeseran kita sisir bisa diambilkan dari OPD besar, jika kami lihat di tahun 2025 silpa OPD itu banyak sekali yang tidak terlaksana, mungkin kalau PU atau kegiatan yang atau Perkim mungkin ada.

KEPALA BIDANG IMPRASWIL

- Mungkin hanya mengingatkan saja Pak untuk kegiatan yang proyek strategis daerah. Kebetulan kemarin sudah terbit SKnya hanya saja ada tiga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan gitu. Jadi mungkin untuk di tahapan pergeseran ini ada beberapa paket pengganti itu kiranya mungkin tidak ada pergerakan lagi Pak. Kemungkinan di Dispora itu juga ada pergeseran, hanya saja menggeser dari kegiatan yang ada. mengingat juga SK itu harus diupload di bulan sebelum Maret, jadi mungkin di pergeseran ini kami berarti untuk yang program strategis ini sudah tidak ada pergerakan pagu lagi. dan untuk yang Dispora itu kemungkinan tahapannya di pergeseran ini.

V. KESIMPULAN / KESEPAKATAN

Beberapa hasil Kesepakatan rapat adalah sebagai berikut :

- untuk jadwal pergeseran nanti Bidang Anggaran berkoordinasi dengan Bappeda untuk jadwalnya, terkait tindak lanjut pergeseran akan kita rapatkan lagi.
- Untuk pembayaran hutang di pergeseran pertama ini kita ambilkan dari TPP satu bulan.
- Untuk Stunting dan Kemiskinan jangan lupa di koordinasikan saja dengan Bidang Anggaran dan dilaksanakan saat pergeseran karena dampaknya adalah laporan nanti.
- Terkait dengan arahan yang disampaikan terkait perjalanan dinas apakah akan bahas dulu selanjutnya membuat surat edaran terkait dengan pengaturan perjalanan dinas.
- Kita akan memberikan penjelasan kepada Pak Bupati terkait hibah uang, terkait dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.
- Bidang Anggaran akan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk ke Bagian hukum, yang selanjutnya dapat diproses menjadi Peraturan Bupati.

VI. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (daftar hadir terlampir).

Kabupaten Paser,

Pimpinan Sidang/Rapat
Sekretaris Daerah



Katsul Wijaya